

BAB I : PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Penelitian

Pembangunan manusia merupakan ukuran fundamental bagi keberhasilan pembangunan suatu negara.¹ Dalam paradigma pembangunan modern, manusia dipandang tidak hanya sebagai objek pembangunan, melainkan sebagai subjek sekaligus tujuan akhir dari seluruh aktivitas ekonomi dan sosial. Sejak diperkenalkan oleh *United Nations Development Programme* (UNDP) melalui *Human Development Report* pada tahun 1990, konsep *Human Development Index* (HDI) atau Indeks Pembangunan Manusia (IPM) menjadi instrumen utama untuk mengukur keberhasilan pembangunan berdasarkan tiga dimensi utama yaitu pendidikan, kesehatan, dan standar hidup layak.² Ketiga dimensi tersebut merepresentasikan kemampuan manusia untuk menjalani kehidupan yang panjang, berpengetahuan, dan produktif.

Secara global, sejauh ini capaian pembangunan manusia masih menunjukkan ketimpangan yang cukup besar antar negara. Berdasarkan data UNDP *Human Development Report* (2024), rata-rata IPM dunia mencapai 0,739, dan mencatatkan negara-negara maju seperti Norwegia (0,961), Swiss (0,955), dan Singapura (0,939) berada pada kategori sangat tinggi, sedangkan banyak negara berkembang di kawasan Afrika dan Asia Selatan masih memiliki IPM di bawah 0,600.³ Kesenjangan tersebut menunjukkan bahwa pertumbuhan ekonomi tidak serta merta menjamin peningkatan kualitas hidup manusia apabila investasi dalam pendidikan, kesehatan, dan infrastruktur belum optimal.

¹ Amartya Sen dan Amartya Sen, *Development as Freedom* (Oxford, New York: Oxford University Press, 1999).

² United Nations, *Human Development Report 1990, Human Development Reports* (United Nations, 1 January 1990), diakses 3 September 2025, <https://hdr.undp.org/content/human-development-report-1990>.

³ United Nations, *Human Development Report 2023-24, Human Development Reports* (United Nations, 13 March 2024), diakses 3 September 2025, <https://hdr.undp.org/content/human-development-report-2023-24>.

Indonesia sebagai negara berkembang menunjukkan tren peningkatan pembangunan manusia yang cukup stabil dalam satu dekade terakhir. Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS, 2024), IPM nasional meningkat dari 69,55 pada tahun 2015 menjadi 75,02 pada tahun 2024, dan kini telah termasuk dalam kategori “tinggi”.⁴ Peningkatan ini menggambarkan adanya kemajuan pada dimensi pendidikan, kesehatan, dan daya beli masyarakat. Namun, dibalik capaian nasional tersebut, masih terdapat ketimpangan pembangunan antar wilayah yang mencolok, baik antara kawasan barat dengan timur Indonesia, maupun antara wilayah perkotaan dan kepulauan. Hal ini menunjukkan bahwa pembangunan manusia di Indonesia belum merata dan masih terpusat pada daerah-daerah yang memiliki kapasitas fiskal dan infrastruktur yang memadai.

Pada sisi lain, jika ditinjau antar provinsi, capaian IPM di Indonesia menunjukkan ketimpangan yang cukup mencolok. Provinsi-provinsi di Jawa dan Bali rata-rata mencatat IPM di atas 75, bahkan DKI Jakarta dan DI Yogyakarta mendekati angka 80. Sebaliknya, provinsi-provinsi di kawasan timur Indonesia, seperti Papua dan Nusa Tenggara Timur (NTT), masih berada di bawah 70.⁵ Fenomena ini memperlihatkan adanya ketimpangan pembangunan manusia secara horizontal (antarprovinsi) maupun vertikal (antara wilayah perkotaan dan pedesaan).

Di Jawa Timur, IPM pada tahun 2024 mencapai 75,35, sedikit lebih tinggi dari rata-rata nasional. Namun, capaian ini menyembunyikan kesenjangan internal yang tajam. Kota-kota besar seperti Surabaya dan Malang mencatat IPM di atas 84, setara dengan kota-kota modern di Indonesia. Sebaliknya, kabupaten-kabupaten di Pulau Madura justru konsisten berada di posisi

⁴ BPS-Statistics Indonesia, “Indonesia’s Human Development Index (HDI) in 2024 Reached 75.02, an Increase of 0.63 Points or 0.85% Compared to the Previous Year Which Was 74.39.,” diakses 7 November 2025, <https://www.bps.go.id/en/pressrelease/2024/11/15/2296/indonesias-human-development-index--hdi--in-2024-reached-75-02--an-increase-of-0-63-points-or-0-85-percent-compared-to-the-previous-year-which-was-74-39-.html>.

⁵ Badan Pusat Statistik Indonesia, “[Metode Baru] Indeks Pembangunan Manusia menurut Provinsi - Tabel Statistik,” diakses 3 September 2025, <https://www.bps.go.id/id/statistics-table/2/NDk0IzI=-metode-baru-indeks-pembangunan-manusia-menurut-provinsi.html>.

terbawah dengan nilai IPM hanya berkisar antara 66 hingga 71.⁶ Data dari Badan Pusat Statistik (2024) menunjukkan, bahwa Kabupaten Sampang dan Bangkalan menempati posisi terendah, sementara Pamekasan dan Sumenep berada sedikit lebih baik, sekalipun masih tetap di bawah rata-rata provinsi. Koran Madura (2023) bahkan menegaskan bahwa Bangkalan menempati peringkat kedua terbawah dari 38 kabupaten/kota di Jawa Timur.⁷

Selama periode 2015–2024, Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Provinsi Jawa Timur, secara umum mengalami peningkatan, akan tetapi laju peningkatan tersebut, tidak merata khususnya jika dilihat dari angka peningkatan antar wilayah. Perbandingan capaian IPM antar wilayah di Provinsi Jawa Timur, selama periode tahun 2015–2024 menunjukkan disparitas peningkatan yang cukup signifikan, sebagaimana pada gambar 1.1 berikut.

Gambar 1. 1
Ranking Indeks Pembangunan Manusia
10 Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Timur



Sumber: BPS Jawa Timur (Data diolah).

⁶ Badan Pusat Statistik Kabupaten Probolinggo, “Indeks Pembangunan Manusia Menurut Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Timur - Tabel Statistik,” diakses 3 September 2025, <https://probolinggokab.bps.go.id/id/statistics-table/2/MjczIzI=/indeks-pembangunan-manusia-menurut-kabupaten-kota-di-provinsi-jawa-timur.html>.

⁷ Koran Madura, “IPM Bangkalan Peringkat Kedua Dari Bawah Di Jatim,” *Satu Hati Untuk Bangsa*, 12 June 2023, diakses 3 September 2025, <https://www.koranmadura.com/2023/06/ipm-bangkalan-peringkat-kedua-dari-bawah-di-jatim/>.

Gambar di atas memperlihatkan bahwa selama satu dekade terakhir, empat kabupaten di Kepulauan Madura, yaitu Bangkalan, Sampang, Pamekasan, dan Sumenep, secara konsisten menempati posisi terendah dalam capaian IPM di Jawa Timur. Selisih IPM antara daerah tertinggi (Surabaya) dan terendah (Sampang) mencapai hampir 18 poin, menandakan adanya kesenjangan pembangunan manusia yang sangat lebar di dalam satu provinsi.

Rendahnya IPM di Madura tidak hanya disebabkan oleh lambannya pertumbuhan ekonomi, tetapi juga oleh keterbatasan infrastruktur, rendahnya kualitas pendidikan, dan terbatasnya pelayanan kesehatan. Berdasarkan BPS Madura (2024), rata-rata lama sekolah di Madura hanya 7,6 tahun, menunjukkan bahwa sebagian besar penduduk belum menamatkan pendidikan menengah. Angka harapan hidup juga masih rendah, yaitu 68,7 tahun, di bawah rata-rata Jawa Timur (73,3 tahun). Selain itu, persentase penduduk miskin di wilayah ini masih berkisar 15–18%, tertinggi di Jawa Timur.⁸

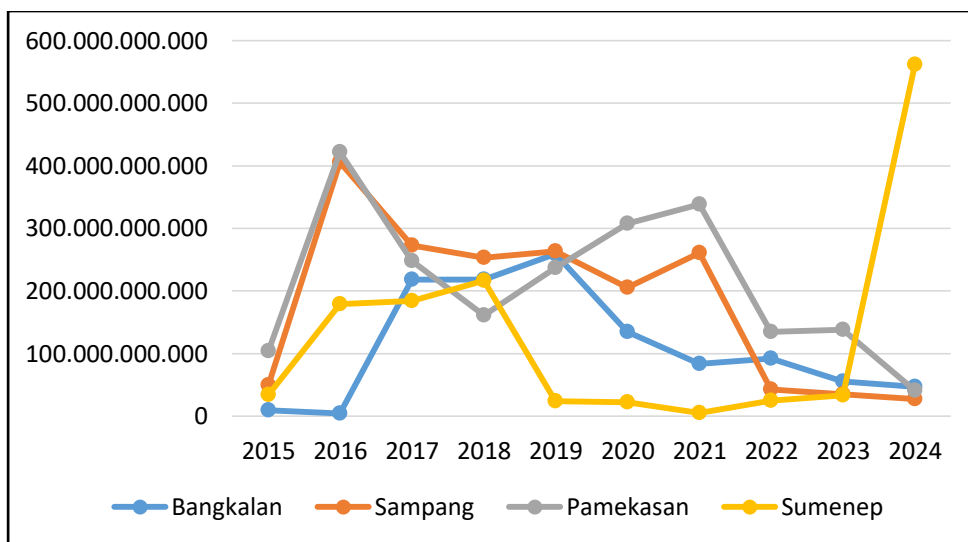
Dari sisi fiskal, laporan Kementerian Keuangan (2024) menunjukkan bahwa tingkat kemandirian fiskal kabupaten di Madura masih sangat rendah, yakni hanya 9–12%, sementara lebih dari 75% pendapatan daerah bergantung pada dana transfer pusat. Komposisi anggaran belanja daerah pun belum produktif, di mana belanja pegawai mencapai 52–55%, sedangkan belanja pendidikan hanya sekitar 27%, kesehatan 9%, dan infrastruktur 16%. Kondisi ini menunjukkan bahwa kebijakan fiskal di Madura lebih berorientasi pada aspek administratif dari pada investasi produktif untuk peningkatan kualitas manusia.⁹ Masalah ini menggambarkan bahwa peningkatan IPM di Madura tidak hanya bergantung pada jumlah anggaran yang tersedia, tetapi lebih pada efektivitas dan arah alokasi belanja publik.

⁸ “Pertumbuhan IPM Melambat, Akademisi Sebut Potret Pendidikan Madura Buruk - Kabar Madura,” 1 May 2025, diakses 4 September 2025, <https://kabarmadura.id/pertumbuhan-ipm-melambat-akademisi-sebut-potret-pendidikan-madura-buruk/>.

⁹ Bedy Satria Rizky Wijaya, “Pertumbuhan Ekonomi Dengan Menggunakan Metode Analisis Kemandirian: Studi Kasus Apbd Dan Lra Pemerintah Daerah Kota Surabaya Dan Seluruh Kabupaten Di Madura Tahun 2014 - 2018” (2019).

Adapun gambaran empiris dari permasalahan ini, dapat dilihat dari data perkembangan belanja daerah berdasarkan sektor pendidikan, kesehatan, dan infrastruktur di empat kabupaten di Kepulauan Madura tahun 2015–2024.

Gambar 1. 2
Realisasi Anggaran Infrstruktur

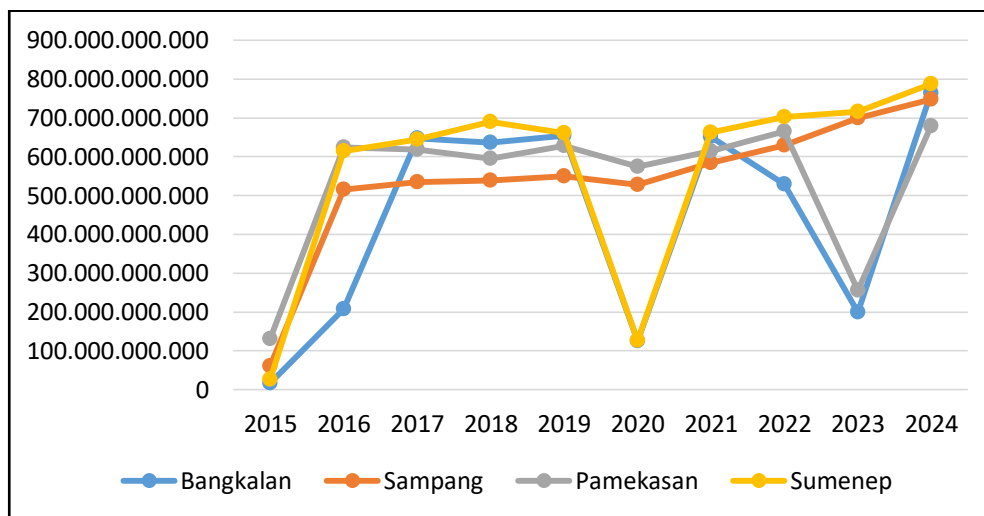


Sumber: DJPK (Data diolah)

Berdasarkan Gambar 1.2 terlihat bahwa belanja pemerintah daerah pada sektor infrastruktur di empat kabupaten wilayah Madura cenderung mengalami peningkatan, meskipun masih menunjukkan fluktuasi pada beberapa periode. Secara teoritis, peningkatan belanja infrastruktur diharapkan mampu menciptakan lingkungan yang lebih kondusif bagi peningkatan kualitas hidup masyarakat sehingga pada akhirnya dapat mendorong peningkatan Indeks Pembangunan Manusia.

Selain infrastruktur, sektor pendidikan juga memperoleh alokasi anggaran yang relatif besar karena merupakan salah satu komponen utama dalam pembangunan manusia. Investasi pemerintah pada sektor pendidikan diharapkan mampu meningkatkan kualitas sumber daya manusia melalui pemerataan akses pendidikan, peningkatan mutu layanan pendidikan, serta pengembangan kompetensi masyarakat.

Gambar 1. 3
Realisasi Anggaran Pendidikan

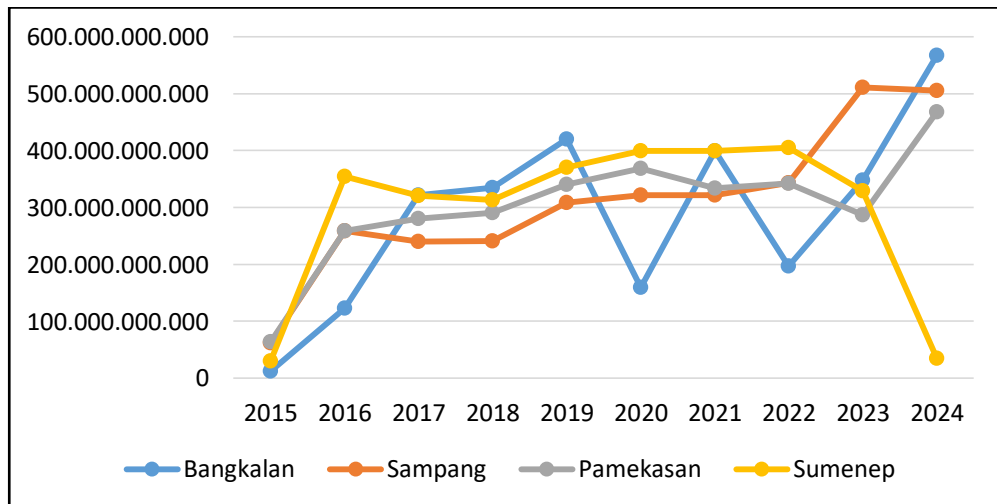


Sumber: DJPK (Data diolah)

Berdasarkan Gambar 1.3 terlihat bahwa belanja pemerintah daerah pada sektor pendidikan selama periode penelitian menunjukkan kecenderungan meningkat. Secara konseptual, peningkatan belanja pendidikan diharapkan memberikan kontribusi terhadap peningkatan dimensi pendidikan dalam Indeks Pembangunan Manusia.

Sektor kesehatan juga merupakan salah satu prioritas pembangunan karena berhubungan langsung dengan peningkatan kualitas hidup dan harapan hidup masyarakat. Melalui alokasi belanja kesehatan, pemerintah daerah berupaya meningkatkan akses dan kualitas pelayanan kesehatan, penyediaan sarana dan prasarana kesehatan, serta pelaksanaan berbagai program kesehatan masyarakat.

Gambar 1. 4
Realisasi Belanja Kesehatan



Sumber: DJPK (Data diolah)

Berdasarkan Gambar 1.4 terlihat bahwa belanja pemerintah daerah pada sektor kesehatan di empat kabupaten wilayah Madura juga mengalami perkembangan yang cenderung meningkat selama periode penelitian. Secara teoritis, peningkatan belanja kesehatan diharapkan mampu meningkatkan derajat kesehatan masyarakat yang pada akhirnya berkontribusi terhadap peningkatan Indeks Pembangunan Manusia.

Secara agregat, data belanja publik di empat kabupaten Madura menunjukkan bahwa meskipun belanja pendidikan dan kesehatan cenderung meningkat secara nominal dalam satu dekade terakhir, pola alokasinya masih fluktuatif. Belanja infrastruktur bahkan menunjukkan volatilitas yang lebih tinggi dibandingkan sektor lainnya. Di sisi lain, peningkatan nominal belanja tersebut belum sepenuhnya diikuti oleh percepatan peningkatan IPM yang signifikan, terutama di Kabupaten Bangkalan dan Sampang yang masih berada pada kelompok IPM terendah di Jawa Timur.

Kondisi ini mengindikasikan bahwa persoalan pembangunan manusia di Madura tidak hanya berkaitan dengan besaran anggaran, tetapi juga menyangkut efektivitas, konsistensi, serta arah kebijakan fiskal. Berdasarkan uraian tersebut, dapat dipahami bahwa persoalan pembangunan manusia di Kepulauan Madura bukan hanya terletak pada keterbatasan anggaran, tetapi

juga pada konsistensi, efektivitas, dan kesesuaian arah kebijakan dengan prinsip-prinsip *maqāṣid al-syarī'ah*. Dalam pemikiran Imam al-Juwaini, tujuan utama syariat adalah mewujudkan kemaslahatan (*maṣlaḥah*) dan mencegah kerusakan (*mafsadah*) dalam kehidupan manusia. Kemaslahatan tersebut diwujudkan melalui pemenuhan kebutuhan manusia secara bertahap yang meliputi kebutuhan primer (*darūriyyāt*), kebutuhan sekunder (*ḥājīyyāt*), dan kebutuhan pelengkap (*taḥsīniyyāt*).

Dengan demikian, kebijakan publik, termasuk kebijakan pengalokasian belanja pemerintah daerah, pada hakikatnya tidak hanya diukur dari besarnya anggaran yang dikeluarkan, tetapi juga dari sejauh mana anggaran tersebut mampu menghadirkan kemanfaatan nyata bagi masyarakat. Belanja pendidikan merepresentasikan *ḥifẓ al-'aql* (penjagaan akal), belanja kesehatan mencerminkan *ḥifẓ an-nafs* (penjagaan jiwa), dan belanja infrastruktur berkaitan dengan *ḥifẓ al-māl* (perlindungan dan pengembangan kesejahteraan ekonomi). Ketiga sektor tersebut termasuk kategori kebutuhan primer (*daruriyyat*) yang seharusnya menjadi prioritas utama dalam kebijakan fiskal daerah. Secara normatif, *maqāṣid* menuntut kebijakan yang konsisten, berkelanjutan, dan berorientasi pada kemaslahatan umum. Namun, realitas empiris di Kepulauan Madura menunjukkan adanya fluktuasi dan ketidakstabilan alokasi belanja pada sektor-sektor tersebut.

Dengan demikian, terdapat kesenjangan antara idealitas normatif *maqāṣid al-syarī'ah* yang menuntut keberlanjutan dan kemaslahatan, dengan realitas kebijakan fiskal daerah yang masih menunjukkan volatilitas dan ketidakkonsistenan. Kesenjangan inilah yang menjadi dasar penting dilakukannya penelitian ini.

Selain kesenjangan empiris, terdapat pula *theoretical gap* yang belum banyak disentuh dalam kajian ekonomi pembangunan, yaitu belum adanya penelitian yang meninjau hubungan antara belanja publik dan pembangunan manusia dari perspektif Islam, khususnya menggunakan teori *maqāṣid al-syarī'ah*. Menurut perspektif Jasser Auda, *maqāṣid al-syarī'ah* merupakan tujuan universal syariat yang berorientasi pada terwujudnya kemaslahatan

(*maṣlahah*) melalui pendekatan sistem (*systems approach*).¹⁰ Jasser Auda tidak menolak konsep klasik mengenai lima unsur pokok *maqāṣid* (*al-kullīyyāt al-khams*), yaitu perlindungan terhadap agama (*ḥifẓ ad-dīn*), jiwa (*ḥifẓ an-nafs*), akal (*ḥifẓ al-‘aql*), keturunan (*ḥifẓ an-nasl*), dan harta (*ḥifẓ al-māl*). Namun, konsep tersebut dikembangkan dari sekadar menjaga (*protection*) menjadi upaya mengembangkan (*development*) kualitas kehidupan manusia secara menyeluruh. Dengan demikian, *maqāṣid* tidak hanya dipahami sebagai instrumen untuk mencegah kerusakan, tetapi juga sebagai kerangka pembangunan yang mendorong peningkatan kesejahteraan, keadilan sosial, pemenuhan hak-hak masyarakat, dan pembangunan manusia (*human development*).

Dalam konteks penelitian ini, belanja pemerintah pada sektor pendidikan, kesehatan, dan infrastruktur dipandang sebagai instrumen kebijakan publik yang berorientasi pada pencapaian kemaslahatan masyarakat. Pendidikan berkontribusi terhadap pengembangan akal (*ḥifẓ al-‘aql*) melalui peningkatan kualitas sumber daya manusia, kesehatan mendukung terpeliharanya kehidupan (*ḥifẓ an-nafs*) agar masyarakat dapat hidup secara produktif, sedangkan pembangunan infrastruktur memperkuat perlindungan dan pengembangan harta (*ḥifẓ al-māl*) melalui peningkatan akses ekonomi, konektivitas wilayah, dan efisiensi aktivitas masyarakat. Dengan demikian, ketiga sektor tersebut merupakan bagian dari pembangunan yang tidak hanya memenuhi kebutuhan dasar masyarakat, tetapi juga mendukung terwujudnya tujuan *maqāṣid al-syarī‘ah* berupa pembangunan manusia yang berkeadilan, berkelanjutan, dan berorientasi pada kemaslahatan bersama.

Namun, jika prinsip maqasid tersebut dijadikan tolok ukur, maka kondisi pembangunan di Madura menunjukkan adanya kesenjangan antara nilai ideal maqasid syariah dan realitas kebijakan publik. Secara ideal, belanja publik seharusnya diarahkan untuk mewujudkan kemaslahatan manusia (*tahqiq al-maslahah*) melalui peningkatan akal, jiwa, dan kesejahteraan ekonomi. Akan

¹⁰ Muhammad Mattori, *Memahami Maqashid Syariah Jasser Auda (Berdasarkan Pendekatan Sistem)* (Samarinda: Guepedia, 2020), 36–38.

tetapi, realitas menunjukkan bahwa alokasi belanja daerah di Madura masih berfokus pada kebutuhan administratif, sementara peningkatan kualitas pendidikan, kesehatan, dan infrastruktur belum menjadi prioritas utama. Akibatnya, kemaslahatan masyarakat dalam arti maqasid belum terwujud secara optimal.

Kesenjangan antara teori maqasid syariah yang menuntut kesejahteraan holistik dengan realitas empiris yang menunjukkan ketimpangan pembangunan inilah yang menjadi dasar penelitian ini. Diperlukan kajian empiris yang tidak hanya mengukur sejauh mana belanja pemerintah daerah pada sektor infrastruktur, pendidikan, dan kesehatan berpengaruh terhadap IPM di Madura, tetapi juga menafsirkan hasil tersebut dalam perspektif maqasid syariah Al-Juwaini.

Dengan demikian, penelitian ini diharapkan dapat memberikan pemahaman yang lebih komprehensif tentang efektivitas kebijakan fiskal daerah sekaligus menilai sejauh mana kebijakan tersebut telah mencerminkan prinsip-prinsip syariah dalam mewujudkan kemaslahatan dan kesejahteraan manusia secara menyeluruh. Maka dari itu, penulis tertarik untuk melakukan penelitian lebih lanjut yang dituangkan ke dalam judul : **"Analisis Pengaruh Belanja Pemerintah Daerah Pada Infrastruktur, Pendidikan dan Kesehatan Terhadap Indeks Pembangunan Manusia (IPM) dalam Perspektif Maqashid Syari'ah di Kepulauan Madura Tahun 2015-2024"**

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah di uraikan sebelumnya, maka dirumuskan masalah penelitian agar arahnya lebih terfokus, yaitu sebagai berikut:

1. Bagaimana pengaruh belanja infrastruktur terhadap Indeks Pembangunan Manusia (IPM) dalam Perspektif Maqashid Syari'ah di Kepulauan Madura tahun 2015-2024 ?
2. Bagaimana pengaruh belanja pendidikan terhadap Indeks Pembangunan Manusia (IPM) dalam Perspektif Maqashid Syari'ah di Kepulauan Madura tahun 2015-2024 ?

3. Bagaimana pengaruh belanja kesehatan terhadap Indeks Pembangunan Manusia (IPM) dalam Perspektif Maqshid Syari'ah di Kepulauan Madura tahun 2015-2024 ?
4. Bagaimana pengaruh gabungan antara belanja daerah pada infrastruktur, pendidikan dan kesehatan terhadap Indeks Pembangunan Manusia (IPM) dalam Perspektif Maqshid Syari'ah di Kepulauan Madura tahun 2015-2024 ?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah yang ada, maka penelitian ini memiliki tujuan sebagai berikut:

1. Untuk menganalisis pengaruh belanja infrastruktur terhadap Indeks Pembangunan Manusia (IPM) dalam Perspektif Maqshid Syari'ah di Kepulauan Madura tahun 2015-2024 .
2. Untuk menganalisis pengaruh belanja pendidikan terhadap Indeks Pembangunan Manusia (IPM) dalam Perspektif Maqshid Syari'ah di Kepulauan Madura tahun 2015-2024.
3. Untuk menganalisis pengaruh belanja kesehatan terhadap Indeks Pembangunan Manusia (IPM) dalam Perspektif Maqshid Syari'ah di Kepulauan Madura tahun 2015-2024.
4. Untuk menganalisis pengaruh gabungan antara belanja daerah pada infrastruktur, pendidikan dan kesehatan terhadap Indeks Pembangunan Manusia (IPM) dalam Perspektif Maqshid Syari'ah di Kepulauan Madura tahun 2015-2024.

D. Manfaat Hasil Penelitian

Penelitian ini diharapkan memberikan manfaat pada dua aspek, yakni teoretis dan praktis.

1. Manfaat Teoretis

Penelitian ini diharapkan memberikan kontribusi terhadap pengembangan ilmu ekonomi pembangunan Islam, khususnya dalam integrasi antara analisis empiris pembangunan manusia dan teori *maqāṣid al-syarī'ah*. Kajian ini memperluas pemahaman bahwa pembangunan

manusia tidak hanya diukur melalui indikator material seperti IPM, tetapi juga dari sejauh mana kebijakan fiskal mampu mewujudkan kemaslahatan (*tahqīq al-maṣlaḥah*) melalui pemeliharaan akal, jiwa, dan harta. Dengan demikian, penelitian ini menambah khazanah literatur ekonomi Islam yang menggabungkan pendekatan normatif dan empiris.

2. Manfaat Praktis

Penelitian ini diharapkan menjadi rujukan bagi pemerintah daerah di Kepulauan Madura dalam merumuskan kebijakan belanja publik yang lebih produktif, berkeadilan, dan berorientasi pada peningkatan kualitas manusia. Hasil penelitian ini dapat membantu pemerintah dalam mengidentifikasi sektor mana yang memiliki pengaruh terbesar terhadap pembangunan manusia serta memberikan arah perbaikan alokasi anggaran agar sesuai dengan prinsip kemaslahatan publik menurut maqasid syariah.

E. Penelitian Terdahulu

Sejumlah penelitian telah dilakukan untuk menelaah hubungan antara alokasi belanja publik dengan Indeks Pembangunan Manusia (IPM). Berikut beberapa temuan yang relevan:

Tabel 1. 1
Kajian Penelitian Terdahulu

No	Peneliti, Lokasi & Periode	Judul	Variabel Utama	Hasil Utama	Persamaan	Perbedaan
1	Hartanto, Idrus & Virniasari, Sulawesi Selatan, (2023) ¹¹	Pengaruh Belanja Pendidikan, Belanja Kesehatan Dan Belanja Infrastruktur Terhadap Indeks Pembangunan Manusia Di Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2013 – 2022	Belanja pendidikan, kesehatan, infrastruktur → IPM	Belanja kesehatan berpengaruh negatif namun tidak signifikan, infrastruktur berpengaruh positif tidak signifikan, dan pendidikan berpengaruh positif signifikan.	Sama-sama meneliti pengaruh belanja daerah terhadap IPM	Tidak menggunakan maqasid syariah; wilayah non-kepulauan

¹¹ Tomi Hartanto Et Al., “Pengaruh Belanja Pendidikan, Belanja Kesehatan Dan Belanja Infrastruktur Terhadap Indeks Pembangunan Manusia Di Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2013 – 2022,” *Transekonomika*, Vol.3, No. 1 (2023): 915–926.

2	Hergastyas mawan, Ahyar & Irianto, Kalimantan Timur, (2024)	The Contribution of Local Government Finance to the Islamic Human Development Index	Belanja publik → IHDI (berbasis maqasid syariah)	Pendidikan memengaruhi <i>hifz al-'aql</i> ; kesehatan memengaruhi <i>hifz an-nafs</i>	Sama-sama berbasis maqasid syariah	Tidak meneliti IPM
3	Afrilia Ulfatussani ah et al. Sumatera, (2024) ¹²	Pengaruh Pengeluaran Pemerintah pada Sektor Kesehatan, Pendidikan, Infrastruktur dan Tingkat Kemiskinan terhadap Indeks Pembangunan Manusia di Kabupaten/Kota di Tiga Provinsi Termiskin di Pulau Sumatera	Belanja pendidikan, kesehatan, infrastruktur, kemiskinan → IPM	Pendidikan & kesehatan positif; infrastruktur & kemiskinan negatif	Sama-sama meneliti tiga sektor	Tidak memakai maqasid; wilayah berbeda
4	Kevin Chandra, Kalimantan Selatan (2022) ¹³	Pengaruh Belanja Daerah Sektor Kesehatan dan Belanja Daerah Sektor Pendidikan terhadap Indeks Pembangunan Manusia di Provinsi Kalimantan Selatan	Belanja pendidikan & kesehatan → IPM	Keduanya positif signifikan	Sama-sama sektor dasar IPM	Tidak mencakup infrastruktur & maqasid

¹² Afrilia Ulfatussaniah Et Al., “Pengaruh Pengeluaran Pemerintah Pada Sektor Kesehatan, Pendidikan, Infrastruktur Dan Tingkat Kemiskinan Terhadap Indeks Pembangunan Manusia Di Kabupaten/Kota Di Tiga Provinsi Termiskin Di Pulau Sumatera,” *Journal On Education*, Vol.6, No. 3 (2024): 16720–16729.

¹³ Kevin Candra, “Pengaruh Belanja Daerah Sektor Kesehatan Dan Belanja Daerah Sektor Pendidikan Terhadap Indeks Pembangunan Manusia Di Provinsi Kalimantan Selatan,” Vol.5, No. 1 (2022): 323–337.

5	Iwan Harsono et al. Nusa Tenggara Barat, (2024) ¹⁴	Pengaruh Belanja Pendidikan, Belanja Kesehatan Dan Belanja Bantuan Sosial Terhadap Indeks Pembangunan Manusia Di Provinsi NTB Tahun 2013-2022	Belanja pendidikan, kesehatan, bantuan sosial → IPM	Kesehatan paling signifikan	Sama-sama meneliti belanja sosial & IPM	Tidak memakai maqasid
6	Muhammad Irfan Pratama & Ayu Nursari, Lampung, (2025) ¹⁵	Indeks Pembangunan Manusia Provinsi Lampung: Belanja Pendidikan, Belanja Kesehatan, Kemiskinan dan Produk Domestik Regional Bruto	Belanja pendidikan, kesehatan, PDRB, kemiskinan → IPM	Pendidikan dan kemiskinan berpengaruh negatif, sedangkan kesehatan dan PDRB berpengaruh positif.	Sama-sama hubungan belanja-IPM	Tidak memakai maqasid syariah
7	Dirmansyah Darwin, Sulawesi Selatan, (2022) ¹⁶	Pengaruh belanja pemerintah bidang kesehatan, Pendidikan, dan Belanja modal Terhadap Indeks Pembangunan manusia di provinsi sulawesi Selatan	Belanja pendidikan, kesehatan, modal → IPM	Ketiga variabel signifikan terhadap IPM	Sama-sama tiga sektor publik	Tidak memakai maqasid, lokasi berbeda

¹⁴ Iwan Harsono Et Al., “Pengaruh Belanja Pendidikan, Belanja Kesehatan Dan Belanja Bantuan Sosial Terhadap Indeks Pembangunan Manusia Di Provinsi Ntb Tahun 2013-2022,” *Management Studies And Entrepreneurship Journal*, Vol.5, No. 1 (2024): 802–810.

¹⁵ Muhammad Irfan Pratama Dan Ayu Nursari, “Indeks Pembangunan Manusia Provinsi Lampung: Belanja Pendidikan, Belanja Kesehatan, Kemiskinan Dan Produk Domestik Regional Bruto,” Vol.8, No. 1 (2025): 34–48.

¹⁶ Dirmansyah Darwin, *Pengaruh belanja pemerintah bidang kesehatan, Pendidikan, Dan Belanja modal Terhadap Indeks Pembangunan manusia di provinsi sulawesi Selatan* (Makassar: Universitas Hasanuddin, 2022).

8	Andien Paskarina Alberthus et al. NTT, (2025) ¹⁷	Pengaruh Belanja Pemerintah Daerah Di Sektor Pendidikan, Kesehatan Dan Infrastruktur Terhadap Indeks Pembangunan Manusia Di Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2019-2023	Belanja pendidikan, kesehatan, infrastruktur → IPM	Pendidikan signifikan; dua lainnya tidak signifikan	Meneliti tiga sektor yang sama	Tidak memakai maqasid syariah
9	Nursila T. Ahmat et al. Kawasan Timur Indonesia, (2025) ¹⁸	Analisis Pengaruh Belanja Daerah Bidang Pendidikan, Kesehatan Dan Kemandirian Fiskal Daerah Terhadap Indeks Pembangunan Manusia Yang Dimoderasi Produk Domestik Regional Bruto (Pdrb) Di Kawasan Timur Indonesia	Belanja pendidikan, kesehatan, fiskal, PDRB → IPM	Semua signifikan; PDRB memperkuat hubungan	Sama-sama analisis fiskal terhadap IPM	Tidak memakai maqasid; lokasi luas
10	Marianus A. D. Banase & Rudi Purwono, NTT, (2024) ¹⁹	The Influence Of Government Expenditure On The Human Development Index In Ntt Province	Belanja kesehatan, pendidikan, infrastruktur → IPM	Kesehatan & pendidikan signifikan; infrastruktur tidak	Sama-sama tiga sektor utama	Tidak menggunakan maqasid syariah

¹⁷ Andien Paskarina Alberthus1 Et Al., “Pengaruh Belanja Pemerintah Daerah Di Sektor Pendidikan, Kesehatan Dan Infrastruktur Terhadap Indeks Pembangunan Manusia Di Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2019-2023,” *Journal Of Innovation Research And Knowledge*, Vol.5, No. 2 (2025).

¹⁸ Nursila T. Ahmat Et Al., “Analisis Pengaruh Belanja Daerah Bidang Pendidikan, Kesehatan Dan Kemandirian Fiskal Daerah Terhadap Indeks Pembangunan Manusia Yang Dimoderasi Produk Domestik Regional Bruto (Pdrb) Di Kawasan Timur Indonesia,” *Jurnal Studi Ekonomi Dan Pembangunan (Jsep)*, Vol.3, No. 1 (2025): 505–516.

¹⁹ Marianus Antonius Deo Datus Banase Dan Rudi Purwono, “The Influence Of Government Expenditure On The Human Development Index In Ntt Province,” *Jurnal Ilmu Ekonomi Terapan*, Vol.9, No. 1 (2024): 109–119.

11	Wardhana, Nur, Kharisma & Adam, Wilayah Metropolitan Indonesia, (2021) ²⁰	Analisis Peran Pengeluaran Pemerintah Terhadap Peningkatan Pembangunan Manusia Di Wilayah Metropolitan Indonesia	Belanja infrastruktur, ekonomi, kesehatan, pendidikan → IPM	Semua positif signifikan	Sama-sama mengkaji sektor belanja	Tidak memakai maqasid; urban context
12	Alfian Bagas Ferdiansyah & Ghani R. Febrianti, Kalimantan Timur, (2025) ²¹	Analisis Pengaruh Belanja Pendidikan dan Kesehatan terhadap Indeks Pembangunan Manusia pada Kota/Kabupaten di Provinsi Kalimantan Timur	Belanja pendidikan & kesehatan → IPM	Pendidikan negatif; kesehatan positif signifikan	Sama-sama fokus dua sektor dasar	Tidak memakai maqasid; hasil pendidikan negatif
13	Muhammad Ade Fajar & Lili Indrawati, Cianjur, (2020) ²²	Pengaruh Belanja Pendidikan, Belanja Kesehatan Dan Belanja Perumahan Dan Fasilitas Umum Terhadap Indeks Pembangunan Manusia (Studi Kasus Pada Pemerintah Daerah Kabupaten Cianjur)	Belanja pendidikan, kesehatan, perumahan → IPM	Pendidikan signifikan; dua lainnya tidak	Sama-sama mengukur dampak belanja publik	Tidak memakai maqasid; wilayah berbeda

²⁰ Adithya Wardhana Et Al., “Analisis Peran Pengeluaran Pemerintah Terhadap Peningkatan Pembangunan Manusia Di Wilayah Metropolitan Indonesia,” Vol.7, No. 1 (2021): 1–10.

²¹ Alfian Bagas Ferdiansyah Dan Ghani Rahma Febrianti, “Analisis Pengaruh Belanja Pendidikan Dan Kesehatan Terhadap Indeks Pembangunan Manusia Pada Kota/Kabupaten Di Provinsi Kalimantan Timur,” *Jurnal Manajemen Keuangan Publik*, Vol.9, No. 1 (2025): 18–39.

²² Muhammad Ade Fajar dan Lili Indrawati, “Pengaruh Belanja Pendidikan, Belanja Kesehatan Dan Belanja Perumahan Dan Fasilitas Umum Terhadap Indeks Pembangunan Manusia (Studi Kasus Pada Pemerintah Daerah Kabupaten Cianjur),” *Indonesian Accounting Research Journal*, vol.1, no. 1 (2020): 108–118.

14	Firman Hamid, Andi Samsir & Syamsu Alam, Sulawesi Barat, (2024) ²³	Analisis Pengaruh Belanja Pendidikan, Kesehatan, Infrastruktur Dan Pertumbuhan Ekonomi Terhadap Indeks Pembangunan Manusia Di Provinsi Sulawesi Barat	Belanja pendidikan, kesehatan, infrastruktur, pertumbuhan ekonomi → IPM	Infrastruktur signifikan; tiga variabel lain tidak signifikan	Sama-sama meneliti tiga sektor	Tidak memakai maqasid, wilayah berbeda
15	Zudrun Maryozi, B. Isyandi, Ando Fahda Aulia, Riau, (2022) ²⁴	Pengaruh Pengeluaran Bidang Pendidikan, Kesehatan Dan Infrastruktur Jalan Terhadap Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Di Provinsi Riau Belanja pendidikan, kesehatan, dan infrastruktur jalan terhadap IPM	Belanja pendidikan, kesehatan, dan infrastruktur jalan terhadap IPM	Belanja pendidikan, kesehatan, dan infrastruktur jalan berpengaruh positif dan signifikan terhadap IPM	Sama-sama meneliti pengaruh belanja pemerintah (pendidikan & kesehatan) terhadap IPM	Menambahkan variabel infrastruktur jalan serta lokasi penelitian di Provinsi Riau
16	Iva Ashari Ananda, U. Sulia Sukmawati, Erdila Kidrian, Kalimantan Barat, (2021) ²⁵	Pengaruh Pengeluaran Pemerintah Bidang Pendidikan Dan Kesehatan Terhadap Ipm Pada Kawasan Perbatasan Negara Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2010-2019	Pengeluaran pemerintah bidang pendidikan dan kesehatan terhadap IPM	Secara parsial: pendidikan tidak signifikan , kesehatan signifikan terhadap IPM. Secara simultan keduanya berpengaruh signifikan	Sama-sama meneliti pengeluaran pemerintah bidang pendidikan dan kesehatan terhadap IPM	Fokus pada wilayah perbatasan

²³ Firman Hamid et al., “Analisis Pengaruh Belanja Pendidikan, Kesehatan, Infrastruktur Dan Pertumbuhan Ekonomi Terhadap Indeks Pembangunan Manusia Di Provinsi Sulawesi Barat,” *Economics and Digital Business Review*, vol.5, no. 2 (2024): 911–921.

²⁴ Zudrun Maryozi et al., “Pengaruh Pengeluaran Bidang Pendidikan, Kesehatan Dan Infrastruktur Jalan Terhadap Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Di Provinsi Riau,” *Jurnal Niara*, vol.15, no. 1 (2022): 1–11.

²⁵ Iva Ashari Ananda Et Al., “Pengaruh Pengeluaran Pemerintah Bidang Pendidikan Dan Kesehatan Terhadap Indeks Pembangunan Manusia (Ipm) Pada Kawasan Perbatasan Negara Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2010-2019,” *Cross-Border*, Vol.4, No. 2 (2021): 429–452.

17	Sarah Simamora, Nurjannah, Iskandar, Sumatera Utara, (2025) ²⁶	Pengaruh Pengeluaran Pemerintah Sektor Pendidikan, Kesehatan Dan Infrastruktur Terhadap Indeks Pembangunan Manusia Di Provinsi Sumatera Utara.	Pengeluaran pemerintah sektor pendidikan, kesehatan, dan infrastruktur terhadap IPM	Pendidikan berpengaruh positif tidak signifikan , kesehatan positif signifikan , infrastruktur positif tidak signifikan terhadap IPM	Sama-sama meneliti pengaruh belanja pemerintah pada sektor pendidikan, kesehatan, dan infrastruktur terhadap IPM	Periode lebih panjang (2010–2024) dan hasil menunjukkan n tidak semua variabel signifikan , berbeda dengan penelitian yang biasanya signifikan semua
18	Dila Fadila, Ruslan Abdul Ghofur, Yulistia Devi, Lampung, (2023) ²⁷	Pengaruh Pengeluaran Pemerintah Pada Sektor Pendidikan Dan Kesehatan Terhadap Indeks Pembangunan Manusia Provinsi Lampung Tahun 2017/2022 Dalam Perspektif Ekonomi Islam	Pengeluaran pemerintah sektor pendidikan dan kesehatan terhadap IPM	Pengeluaran sektor pendidikan dan kesehatan berpengaruh positif dan signifikan terhadap IPM	Sama-sama meneliti pengaruh pengeluaran pemerintah pada sektor pendidikan dan kesehatan terhadap IPM	Menggunakan perspektif ekonomi Islam serta tidak memasukkan variabel infrastruktur

²⁶ Sarah Simamora Et Al., “Pengaruh Pengeluaran Pemerintah Sektor Pendidikan, Kesehatan Dan Infrastruktur Terhadap Indeks Pembangunan,” *Jurnal Samudra Ekonomika*, Vol.9, No. 2 (2025): 16–28.

²⁷ Dila Fadila Et Al., “Pengaruh Pengeluaran Pemerintah Pada Sektor Pendidikan Dan Kesehatan Terhadap Indeks Pembangunan Manusia Provinsi Lampung Tahun 2017/2022 Dalam Perspektif Ekonomi Islam,” *Salam: Islamic Economics Journal*, Vol.4, No. 2 (2023): 109–141.

19	Asnidar, Adelia Putri & Nurlaila Hanum, Aceh Tamiang, (2025) ²⁸	Pengaruh Pengeluaran Pemerintah Sektor Pendidikan, Kesehatan dan Infrastruktur terhadap Pertumbuhan Ekonomi dan Indeks Pembangunan Manusia	Pengeluaran pendidikan, kesehatan, infrastruktur → pertumbuhan ekonomi & IPM	Pendidikan negatif; kesehatan & infrastruktur positif signifikan	Sama-sama tiga sektor	Tidak memakai maqasid; tambah mediasi ekonomi
----	--	--	--	--	-----------------------	---

Berdasarkan tabel perbandingan di atas, secara umum terlihat bahwa belanja pemerintah daerah memiliki hubungan positif terhadap peningkatan Indeks Pembangunan Manusia (IPM). Sebagian besar penelitian sebelumnya, seperti Penelitian oleh Hartanto, Idrus, dan Virniasari (2023) menunjukkan bahwa belanja pendidikan berpengaruh positif dan signifikan terhadap IPM, sementara belanja kesehatan dan infrastruktur tidak signifikan. Hasil ini menunjukkan bahwa sektor pendidikan memiliki kontribusi yang lebih dominan dalam meningkatkan kualitas pembangunan manusia. Selanjutnya, Hergastyasmawan, Ahyar, dan Irianto (2024) menggunakan pendekatan maqashid syari'ah dan menemukan bahwa sektor pendidikan berkontribusi pada aspek *hifz al-'aql*, sedangkan kesehatan berkontribusi pada *hifz an-nafs*, meskipun tidak secara langsung mengukur IPM.

Penelitian Afrilia Ulfatussaniah et al. (2024) menemukan bahwa belanja pendidikan dan kesehatan berpengaruh positif terhadap IPM, sedangkan infrastruktur dan kemiskinan berpengaruh negatif. Hasil ini sejalan dengan Kevin Chandra (2022) yang menyatakan bahwa belanja pendidikan dan kesehatan berpengaruh positif dan signifikan terhadap IPM. Sementara itu, Iwan Harsono et al. (2024) menegaskan bahwa sektor kesehatan merupakan variabel yang paling dominan dalam memengaruhi IPM dibandingkan sektor lainnya.

²⁸ Asnidar Et Al., "Pengaruh Pengeluaran Pemerintah Sektor Pendidikan, Kesehatan Dan Infrastruktur Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Dan Indeks Pembangunan Manusia," *Jurnal Ekonomi Dan Pembangunan Indonesia*, Vol.3, No. 2 (2025): 166–181.

Namun, tidak semua penelitian menunjukkan hasil yang konsisten. Muhammad Irfan Pratama dan Ayu Nursari (2025) menemukan bahwa belanja pendidikan justru berpengaruh negatif terhadap IPM, sedangkan kesehatan dan PDRB berpengaruh positif. Hal serupa juga ditemukan oleh Alfian Bagas Ferdiansyah dan Ghani R. Febrianti (2025), di mana pendidikan berpengaruh negatif, sementara kesehatan berpengaruh positif signifikan. Di sisi lain, Dirmansyah Darwin (2022) serta Nursila T. Ahmat et al. (2025) menunjukkan bahwa seluruh variabel yang diteliti berpengaruh signifikan terhadap IPM.

Penelitian lainnya menunjukkan variasi hasil yang berbeda-beda. Andien Paskarina Alberthus et al. (2025) dan Marianus A. D. Banase dan Rudi Purwono (2024) menemukan bahwa hanya sektor pendidikan dan kesehatan yang signifikan, sedangkan infrastruktur tidak. Bahkan, Firman Hamid et al. (2024) menunjukkan bahwa hanya infrastruktur yang berpengaruh signifikan terhadap IPM. Sementara itu, Wardhana et al. (2021) menemukan bahwa seluruh sektor belanja memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap IPM di wilayah metropolitan.

Selain itu, penelitian Muhammad Ade Fajar dan Lili Indrawati (2020) menunjukkan bahwa hanya belanja pendidikan yang berpengaruh signifikan terhadap IPM. Berbeda dengan itu, Zudrun Maryozi, B. Isyandi, dan Ando Fahda Aulia (2022) menemukan bahwa seluruh variabel (pendidikan, kesehatan, dan infrastruktur jalan) berpengaruh positif dan signifikan terhadap IPM. Penelitian Iva Ashari Ananda et al. (2021) juga menunjukkan bahwa secara parsial pendidikan tidak signifikan, tetapi secara simultan bersama kesehatan berpengaruh signifikan terhadap IPM.

Penelitian yang lebih mutakhir oleh Sarah Simamora, Nurjannah, dan Iskandar (2025) menunjukkan bahwa hanya sektor kesehatan yang berpengaruh signifikan, sementara pendidikan dan infrastruktur tidak. Sementara itu, penelitian Dila Fadila, Ruslan Abdul Ghofur, dan Yulistia Devi (2023) menemukan bahwa sektor pendidikan dan kesehatan berpengaruh positif dan signifikan terhadap IPM dengan pendekatan ekonomi Islam. Adapun penelitian Asnidar, Adelia Putri, dan Nurlaila Hanum (2025) menunjukkan bahwa

pendidikan berpengaruh negatif, sedangkan kesehatan dan infrastruktur berpengaruh positif melalui pertumbuhan ekonomi.

Berdasarkan berbagai hasil penelitian tersebut, dapat disimpulkan bahwa terdapat perbedaan hasil yang cukup signifikan antar penelitian, baik dari segi arah maupun tingkat signifikansi pengaruh variabel. Hal ini menunjukkan bahwa hubungan antara belanja pemerintah daerah dan IPM bersifat kontekstual dan dipengaruhi oleh kondisi wilayah, karakteristik daerah, serta pendekatan analisis yang digunakan.

Selain itu, sebagian besar penelitian terdahulu masih menggunakan pendekatan konvensional dan belum banyak yang mengintegrasikan perspektif maqashid syari'ah secara langsung dalam analisis IPM. Padahal, konsep maqashid syari'ah menawarkan pendekatan yang lebih komprehensif dalam menilai pembangunan manusia, tidak hanya dari aspek material tetapi juga mencakup dimensi kesejahteraan yang lebih luas.

Di sisi lain, penelitian yang secara spesifik mengkaji wilayah kepulauan, khususnya Kepulauan Madura, masih sangat terbatas. Padahal, wilayah kepulauan memiliki karakteristik yang berbeda dibandingkan wilayah daratan, seperti keterbatasan infrastruktur, akses pendidikan, serta pelayanan kesehatan yang dapat memengaruhi capaian IPM secara berbeda. Dengan demikian, dapat diidentifikasi adanya ketidakkonsistenan hasil penelitian terdahulu, dimana masih terbatasnya penggunaan perspektif maqashid syari'ah dalam analisis IPM, dan minimnya kajian pada wilayah kepulauan, khususnya Kepulauan Madura.

Berdasarkan celah tersebut, penelitian ini memiliki perbedaan dan kebaruan dibandingkan penelitian sebelumnya, yaitu dengan mengkaji pengaruh belanja pemerintah daerah pada sektor infrastruktur, pendidikan, dan kesehatan terhadap IPM dalam perspektif maqashid syari'ah, serta mengambil lokasi penelitian di Kepulauan Madura dengan periode yang lebih mutakhir, yaitu tahun 2015–2024. Dengan pendekatan tersebut, penelitian ini diharapkan dapat memberikan analisis yang lebih komprehensif dan kontekstual dalam

menjelaskan pembangunan manusia, khususnya dalam kerangka ekonomi Islam.

F. Kerangka Berpikir

1. Pengaruh Belanja Infrastruktur terhadap Indeks Pembangunan Manusia (IPM)

Dalam *Human Development Theory* yang dikemukakan oleh Amartya Sen dan dikembangkan oleh *United Nations Development Programme* (UNDP), pembangunan tidak hanya dipandang sebagai peningkatan pertumbuhan ekonomi, tetapi sebagai proses memperluas kemampuan (*capability*) masyarakat agar dapat hidup sehat, memperoleh pendidikan yang layak, serta menikmati standar hidup yang baik.²⁹ Salah satu faktor yang berperan dalam meningkatkan kemampuan tersebut adalah tersedianya infrastruktur yang memadai. Infrastruktur menjadi sarana penting dalam memperluas akses masyarakat terhadap layanan pendidikan, kesehatan, transportasi, air bersih, serta berbagai pelayanan publik lainnya sehingga mampu mendukung peningkatan kualitas hidup yang tercermin dalam Indeks Pembangunan Manusia (IPM).

Dalam perspektif *maqāṣid al-syarī'ah*, pembangunan infrastruktur tidak hanya dipandang sebagai penyediaan aset fisik, tetapi merupakan bagian dari upaya mewujudkan tujuan syariat melalui pembangunan manusia (*human development*) dan kemaslahatan publik (*public welfare*). Jasser Auda menjelaskan bahwa *maqāṣid* harus dipahami secara dinamis dengan pendekatan sistem (*systems approach*), yaitu melihat setiap kebijakan publik sebagai bagian yang saling terhubung dalam mewujudkan kesejahteraan masyarakat.³⁰ Oleh karena itu, pembangunan infrastruktur tidak hanya dinilai dari keberadaan jalan, jembatan, atau fasilitas publik, tetapi dari sejauh mana infrastruktur tersebut mampu

²⁹ Nations, *Human Development Report* 1990.

³⁰ Jasser Auda, *Maqasid Al-Shariah as Philosophy of Islamic Law: A Systems Approach* (London: international institute of islamic thought, 2021), 52.

meningkatkan akses masyarakat terhadap pendidikan, pelayanan kesehatan, aktivitas ekonomi, dan berbagai layanan dasar lainnya.

Dalam kerangka *maqāṣid* tersebut, pembangunan infrastruktur berkaitan dengan *ḥifẓ al-māl*, yaitu menjaga sekaligus mengembangkan kesejahteraan ekonomi masyarakat. Menurut Jasser Auda, konsep *ḥifẓ al-māl* tidak lagi dimaknai sebatas perlindungan terhadap kepemilikan harta, melainkan mencakup pengembangan kapasitas ekonomi, pemerataan akses terhadap sumber daya, serta terciptanya sistem pembangunan yang memberikan manfaat bagi seluruh masyarakat.³¹ Dengan demikian, belanja pemerintah pada sektor infrastruktur merupakan instrumen strategis untuk meningkatkan produktivitas ekonomi, memperluas kesempatan masyarakat memperoleh pelayanan publik, serta menciptakan lingkungan yang mendukung peningkatan kualitas hidup

Dalam konteks kebijakan fiskal daerah, belanja pemerintah pada sektor infrastruktur merupakan instrumen untuk menyediakan sarana dan prasarana publik yang dapat memperluas akses masyarakat terhadap pelayanan dasar. Semakin efektif pengalokasian belanja infrastruktur, maka semakin besar peluang meningkatnya kualitas pembangunan manusia. Berbagai penelitian terdahulu menunjukkan adanya variasi temuan. Penelitian oleh Hartanto, Idrus, dan Virniasari (2023), Andien Paskarina Alberthus et al. (2025), serta Marianus A. D. Banase dan Rudi Purwono (2024) menunjukkan bahwa belanja infrastruktur berpengaruh positif namun tidak signifikan terhadap IPM. Sebaliknya, penelitian oleh Firman Hamid, Andi Samsir, dan Syamsu Alam (2024) serta Zudrun Maryozi, B. Isyandi, dan Ando Fahda Aulia (2022) menemukan bahwa infrastruktur berpengaruh signifikan.

Perbedaan ini menguatkan teori bahwa infrastruktur bekerja secara tidak langsung dan efeknya sangat bergantung pada keterkaitannya dengan sektor lain. Dengan demikian, belanja infrastruktur tetap diduga

³¹ Muhammad Mattori, *Memahami Maqashid Syariah Jasser Auda (Berdasarkan Pendekatan Sistem)*, 48.

berpengaruh terhadap IPM melalui hubungan yang saling terintegrasi dengan sektor pendidikan dan kesehatan.

2. Pengaruh Belanja Pendidikan terhadap Indeks Pembangunan Manusia (IPM)

Human Development Theory menempatkan pendidikan sebagai salah satu dimensi utama pembangunan manusia karena pendidikan meningkatkan kemampuan individu untuk memperoleh kehidupan yang lebih baik.³² Melalui belanja pendidikan, pemerintah berupaya meningkatkan pemerataan akses pendidikan, mutu pembelajaran, penyediaan sarana pendidikan, serta peningkatan kualitas tenaga pendidik. Peningkatan kualitas pendidikan tersebut diharapkan mampu meningkatkan rata-rata lama sekolah dan harapan lama sekolah yang menjadi komponen penyusun Indeks Pembangunan Manusia (IPM).

Pendidikan merupakan instrumen utama dalam mewujudkan tujuan *maqāṣid al-syarī'ah* melalui pengembangan kualitas manusia (*human development*). Menurut Jasser Auda, *maqāṣid* tidak hanya berorientasi pada perlindungan terhadap aspek-aspek dasar kehidupan, tetapi juga diarahkan pada pengembangan kapasitas manusia agar mampu berkontribusi terhadap kemajuan masyarakat.³³ Oleh karena itu, pendidikan dipandang sebagai investasi jangka panjang yang memungkinkan individu memperoleh pengetahuan, meningkatkan keterampilan, memperluas cara berpikir, serta membangun kreativitas dan inovasi. Melalui pendekatan sistem (*systems approach*), Jasser Auda menjelaskan bahwa peningkatan kualitas pendidikan tidak dapat dipisahkan dari sistem pembangunan secara keseluruhan karena pendidikan memiliki keterkaitan erat dengan sektor ekonomi, kesehatan, sosial, dan tata kelola pemerintahan.

Dalam kerangka *maqāṣid* tersebut, belanja pendidikan berkaitan dengan *ḥifẓ al-'aql*, yaitu menjaga sekaligus mengembangkan potensi

³² Marianus Antonius Deo Datus Banase Dan Rudi Purwono, "The Influence Of Government Expenditure On The Human Development Index In Ntt Province."

³³ Jasser Auda, *Maqasid Al-Shariah As Philosophy Of Islamic Law: A Systems Approach*, 60.

akal manusia. Menurut Jasser Auda, *hifẓ al-'aql* tidak lagi dipahami sebatas menjaga manusia dari kebodohan atau kerusakan akal, melainkan diarahkan pada pengembangan kapasitas intelektual, peningkatan kualitas sumber daya manusia, serta perluasan kesempatan memperoleh pendidikan yang berkualitas. Dengan demikian, alokasi belanja pendidikan tidak hanya dimaksudkan untuk memenuhi kebutuhan operasional penyelenggaraan pendidikan, tetapi juga menjadi instrumen strategis dalam menciptakan masyarakat yang berpengetahuan, inovatif, produktif, dan memiliki daya saing sehingga mampu meningkatkan kualitas pembangunan manusia secara berkelanjutan.³⁴

Hasil berbagai penelitian terdahulu juga menunjukkan bahwa belanja pendidikan umumnya memberikan pengaruh positif terhadap peningkatan IPM, meskipun dipengaruhi oleh efektivitas pengelolaan anggaran di masing-masing daerah. Hasil penelitian terdahulu sebagian besar mendukung hubungan ini. Penelitian oleh Kevin Chandra (2022), Zudrun Maryozi, B. Isyandi, dan Ando Fahda Aulia (2022), serta Dila Fadila, Ruslan Abdul Ghofur, dan Yulistia Devi (2023) menunjukkan bahwa belanja pendidikan berpengaruh positif dan signifikan terhadap IPM. Namun, terdapat hasil berbeda dari Muhammad Irfan Pratama dan Ayu Nursari (2025) serta Alfian Bagas Ferdiansyah dan Ghani R. Febrianti (2025) yang menemukan pengaruh negatif, serta Iva Ashari Ananda, U. Sulia Sukmawati, dan Erdila Kidrian (2021) yang menemukan tidak signifikan secara parsial.

Perbedaan ini menunjukkan bahwa meskipun secara teori pendidikan memiliki hubungan langsung dengan IPM, efektivitasnya tetap dipengaruhi oleh kualitas pengelolaan anggaran. Dengan demikian, belanja pendidikan diduga berpengaruh terhadap IPM.

3. Pengaruh Belanja Kesehatan terhadap Indeks Pembangunan Manusia (IPM)

³⁴ Muhammad Umer Chapra, *The Islamic Vision of Development in the Light of the Maqāsid Al-Sharī'ah* (London-Washington: the international institute of islamic thought, 2008), 27.

Dalam *Human Development Theory*, kesehatan merupakan salah satu dimensi utama pembangunan manusia karena menentukan kualitas hidup, produktivitas, dan harapan hidup masyarakat. Belanja pemerintah daerah pada sektor kesehatan diarahkan untuk meningkatkan kualitas pelayanan kesehatan melalui penyediaan fasilitas kesehatan, tenaga kesehatan, program promotif, preventif, kuratif, dan rehabilitatif. Apabila belanja kesehatan dikelola secara efektif, maka diharapkan mampu meningkatkan derajat kesehatan masyarakat yang tercermin pada peningkatan komponen umur harapan hidup dalam Indeks Pembangunan Manusia (IPM).

Dalam kerangka maqāṣid Syariah, sektor kesehatan berkaitan erat dengan *ḥifẓ an-nafs*, yaitu menjaga sekaligus mengembangkan kualitas kehidupan manusia. Menurut Jasser Auda, *ḥifẓ an-nafs* tidak lagi dimaknai secara sempit sebagai perlindungan manusia dari kematian atau penyakit, tetapi juga mencakup upaya meningkatkan kualitas hidup, memperluas akses terhadap pelayanan kesehatan yang layak, serta menciptakan lingkungan yang mendukung kehidupan yang sehat, aman, dan produktif. Dengan demikian, kebijakan belanja kesehatan seharusnya tidak hanya berorientasi pada pemenuhan kebutuhan pelayanan kesehatan jangka pendek, tetapi juga diarahkan pada penguatan sistem kesehatan yang mampu meningkatkan kualitas pembangunan manusia secara berkelanjutan.

Berbagai penelitian terdahulu menunjukkan bahwa sektor kesehatan memiliki pengaruh yang kuat terhadap IPM. Penelitian oleh Kevin Chandra (2022), Iwan Harsono et al. (2024), Dila Fadila, Ruslan Abdul Ghofur, dan Yulistia Devi (2023), serta Sarah Simamora, Nurjannah, dan Iskandar (2025) menunjukkan bahwa belanja kesehatan berpengaruh positif dan signifikan terhadap IPM. Bahkan dalam penelitian Iwan Harsono et al. (2024), kesehatan menjadi variabel yang paling dominan.

Namun, penelitian oleh Hartanto, Idrus, dan Virniasari (2023) menunjukkan hasil tidak signifikan, yang menandakan bahwa distribusi dan efektivitas layanan kesehatan juga menjadi faktor penting. Dengan demikian, belanja kesehatan diduga memiliki pengaruh yang kuat terhadap IPM sebagai bagian dari kebutuhan dasar manusia.

4. Pengaruh Belanja Pendidikan, Kesehatan, dan Infrastruktur secara Simultan terhadap Indeks Pembangunan Manusia (IPM)

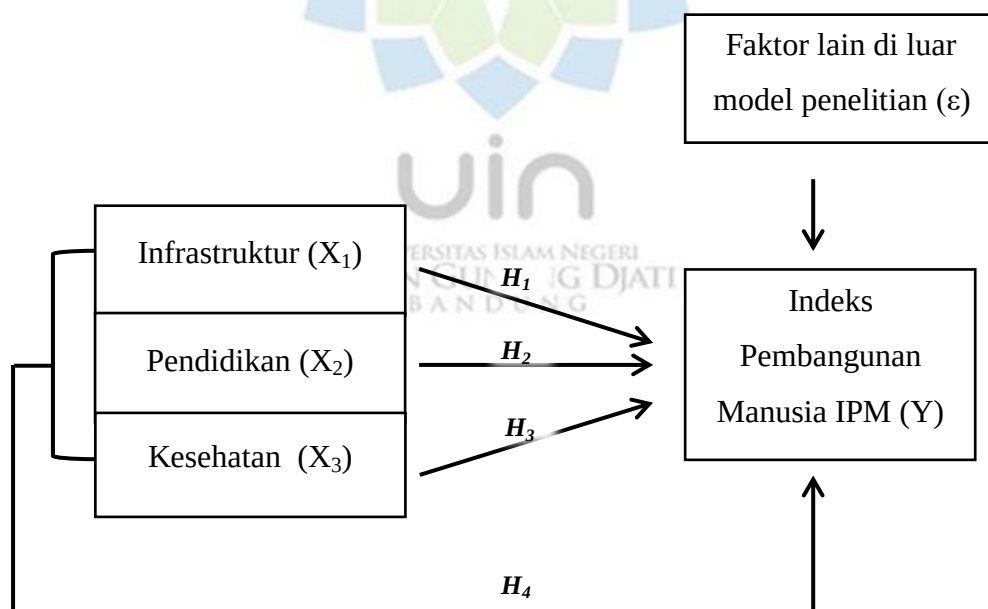
Human Development Theory menjelaskan bahwa pembangunan manusia merupakan hasil dari sinergi berbagai kebijakan publik yang mendukung peningkatan kualitas hidup masyarakat. Oleh karena itu, pembangunan manusia tidak dapat dicapai hanya melalui satu sektor pembangunan, melainkan memerlukan keterpaduan kebijakan pada sektor infrastruktur, pendidikan, dan kesehatan. Ketiga sektor tersebut saling melengkapi dalam meningkatkan kemampuan masyarakat untuk memperoleh kehidupan yang sehat, berpendidikan, produktif, dan sejahtera sehingga secara bersama-sama diharapkan mampu meningkatkan Indeks Pembangunan Manusia (IPM).

Dalam kerangka *maqāṣid al-syarī'ah*, keterpaduan tersebut tercermin melalui hubungan antara *ḥifẓ al-māl*, *ḥifẓ al-'aql*, dan *ḥifẓ an-nafs*. Belanja infrastruktur berkontribusi terhadap pengembangan kesejahteraan ekonomi dan akses masyarakat melalui implementasi *ḥifẓ al-māl*, belanja pendidikan memperkuat kapasitas intelektual masyarakat sebagai wujud *ḥifẓ al-'aql*, sedangkan belanja kesehatan mendukung peningkatan kualitas kehidupan melalui *ḥifẓ an-nafs*. Ketiga dimensi tersebut bukan merupakan tujuan yang berdiri sendiri, tetapi saling melengkapi dalam membentuk pembangunan manusia yang berkelanjutan. Dengan demikian, keberhasilan pembangunan tidak hanya ditentukan oleh keberhasilan masing-masing sektor secara individual,

tetapi juga oleh sinergi di antara ketiganya dalam menghasilkan kemaslahatan publik.³⁵

Hasil penelitian terdahulu menunjukkan bahwa secara simultan variabel belanja pemerintah berpengaruh signifikan terhadap IPM. Hal ini dibuktikan oleh penelitian Dirmansyah Darwin (2022), Nursila T. Ahmat et al. (2025), serta Iva Ashari Ananda, U. Sulia Sukmawati, dan Erdila Kidrian (2021).

Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa secara simultan belanja pemerintah daerah pada sektor infrastruktur, pendidikan, dan kesehatan diduga berpengaruh terhadap IPM karena adanya keterkaitan dan sinergi antar sektor dalam pembangunan manusia. Namun, IPM ini juga tidak hanya di pengaruhi oleh ketiga variabel tersebut, tapi terdapat faktor lain di luar model penelitian. Adapun model penelitian ini ditunjukkan sebagai berikut:



Gambar 1. 5 Hubungan Variabel X dan Y

³⁵ Muhammad Ahsanul Amal et al., "The Impact of Maqashid Syariah on the Human Development Index (HDI): The Case of Indonesia," *Journal of Islamic Economic Laws*, vol.7, no. 02 (10 October 2024): 109–127, diakses 12 April 2026.

G. Hipotesis

Hipotesis merupakan dugaan sementara terhadap rumusan masalah penelitian yang kebenarannya masih harus dibuktikan melalui pengumpulan dan analisis data empiris. Menurut Sugiyono, hipotesis adalah jawaban sementara terhadap rumusan masalah penelitian yang disusun berdasarkan teori dan hasil penelitian terdahulu, sehingga masih memerlukan pengujian untuk memperoleh kesimpulan ilmiah.³⁶

Dalam penelitian kuantitatif, pengujian hipotesis dilakukan dengan menggunakan dua bentuk hipotesis, yaitu hipotesis nol (H_0) dan hipotesis alternatif (H_a). Hipotesis nol (H_0) menyatakan bahwa tidak terdapat pengaruh atau hubungan yang signifikan antara variabel independen terhadap variabel dependen. Sebaliknya, hipotesis alternatif (H_a) menyatakan bahwa terdapat pengaruh atau hubungan yang signifikan antara variabel independen terhadap variabel dependen.

Berdasarkan kerangka pemikiran, kajian teori, dan hasil penelitian terdahulu, maka hipotesis yang diajukan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

- **H_{01}** : Belanja infrastruktur tidak berpengaruh terhadap Indeks Pembangunan Manusia (IPM) dalam Perspektif Maqashid Syari'ah di Kepulauan Madura tahun 2015-2024.
- **H_{a1}** : Belanja infrastruktur berpengaruh signifikan terhadap Indeks Pembangunan Manusia (IPM) dalam Perspektif Maqashid Syari'ah di Kepulauan Madura tahun 2015-2024.
- **H_{02}** : Belanja pendidikan tidak berpengaruh terhadap Indeks Pembangunan Manusia (IPM) dalam Perspektif Maqashid Syari'ah di Kepulauan Madura tahun 2015-2024.
- **H_{a2}** : Belanja pendidikan berpengaruh signifikan terhadap Indeks Pembangunan Manusia (IPM) dalam Perspektif Maqashid Syari'ah di Kepulauan Madura tahun 2015-2024.

³⁶ Sugiyono, *Metode Penelitian Kualitatif, Kuantitatif Dan R&D* (Bandung: Alfabeta, 2017), 99.

- **H₀₃**: Belanja kesehatan tidak berpengaruh terhadap Indeks Pembangunan Manusia (IPM) dalam Perspektif Maqashid Syari'ah di Kepulauan Madura tahun 2015-2024.
- **H_{a3}** : Belanja kesehatan berpengaruh signifikan terhadap Indeks Pembangunan Manusia (IPM) dalam Perspektif Maqashid Syari'ah di Kepulauan Madura tahun 2015-2024.
- **H₀₄**: Belanja infrastruktur, pendidikan, dan kesehatan secara simultan tidak berpengaruh terhadap Indeks Pembangunan Manusia (IPM) dalam Perspektif Maqashid Syari'ah di Kepulauan Madura tahun 2015-2024.
- **H_{a4}**: Belanja infrastruktur, pendidikan dan kesehatan secara simultan berpengaruh signifikan terhadap Indeks Pembangunan Manusia (IPM) dalam Perspektif Maqashid Syari'ah di Kepulauan Madura tahun 2015-2024.

